



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE PROVINSI BANTEN  
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 5 – 7 JULI 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2023**



**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE PROVINSI BANTEN  
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 5 – 7 JULI 2023**

**1. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023 telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Banten dari tanggal 5 sd. 7 Juli 2023 lalu. Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Sidang ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR melihat langsung perkembangan kinerja positif PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia., yang telah bertransformasi menjadi Pertamina Gas Negara, subholding gas bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero).

Komisi VI DPR RI menggunakan kesempatan tersebut untuk mendengar langsung sejauh mana PT PGN melakukan upaya pelaksanaan transformasi, program dan tata Kelola perusahaan yang telah diterapkan agar seluruh

sumberdaya perusahaan bergerak pada satu tujuan yaitu untuk penyediaan energi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Komisi VI DPR RI juga telah mendapat gambaran sejauh mana PT PGN mampu memastikan keamanan dalam pemasangan konversi gas pada kendaraan penumpang maupun sepeda motor, serta memastikan pasokan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tersedia serta kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun 2022

Dalam Kunker Spesifik tersebut, Komisi VI DPR RI ingin PT PGN memastikan pemenuhan Jargas APBN dan Non APBN sebanyak 4 juta sampai tahun 2024 serta sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak ketiga yang terdampak terkait pembangunan jaringan pipa gas bumi maupun jaringan gas untuk rumah tangga. Hal ini juga merupakan bagian dari tindak-lanjut butir butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada 31 Januari 2023 lalu.

## **B. Objek Kunjungan Kerja**

Berkenaan dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI pada tanggal 5 – 7 Juli 2023 adalah PT PGN di Provinsi Banten.

## **C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Secara umum tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT PGN di Provinsi Banten tanggal 5 – 7 Juli 2023 adalah untuk mendapat gambaran langsung sejauh mana PT PGN memastikan pemenuhan Jargas APBN dan Non APBN sebanyak 4 juta sampai tahun 2024. Selain itu, Komisi VI DPR RI ingin memastikan sejauhmana PT PGN telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak ketiga yang terdampak terkait pembangunan jaringan pipa gas bumi maupun jaringan gas untuk rumah tangga terutama di Provinsi Banten.

#### D. Agenda Kunjungan Kerja

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten tanggal 5 sd. 7 Juli 2023, Agenda Komisi VI DPR RI adalah melakukan tatap muka dengan berbagai pihak terutama dalam hal ini adalah Sdr. Abdi Mustakim, Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas Kementerian BUMN, Sdr. Sdr. Arief S. Handoko, Direktur Utama PT Pertamina Gas Negara, Sdr. Fariz Azis, Direktur Sales & Operasi PT Pertamina Gas Negara, Sdr. Achmad Muchtasyar, Direktur Infrastruktur & Teknologi PT Pertamina Gas Negara, serta jajaran perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Kunker Spesifik tersebut.

#### E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Banten dari tanggal 5 sd. 7 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-318	M. SARMUJI, S.E., M.Si.	KETUA TIM / PIMP. KOMISI VI / F-PGOLKAR
2.	A-251	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.	F.PDIP
3.	A-208	dr. H. MUFTI A.N ANAM	F.PDIP
4.	A-232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F.PDIP
5.	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.	F.PG
6.	A-65	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA
7.	A-128	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.	F.GERINDRA
8.	A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.	F.GERINDRA
9.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.	F.PGERINDRA
10.	A-115	KHILMI	F.GERINDRA
11.	A-96	MULAN JAMEELA	F.GERINDRA
12.	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	F.NASDEM
13.	A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P.	F.PKB
14.	A-40	H. ALI AHMAD	F.PKB
15.	A-20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.	F.PKB
16.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD
17.	A-563	PUTU SUPADMA RUDANA	F.PD
18.	A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.	F.PKS
19.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos.	F.PAN

## 2. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Dalam kunjungan Kerja Spesifik ke PGN di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tanggal 5 – 7 Juli 2023, Komisi VI DPR RI menyoroti beberapa hal penting yang berhubungan dengan kinerja perusahaan serta memberi masukan ke PT PGN seperti yang disampaikan di bawah ini:

1. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN untuk mampu meningkatkan produksi dan distribusi gas untuk memenuhi kebutuhan industri dan Rumah Tangga di Indonesia khususnya Provinsi Banten yang semakin meningkat. Dikatakan oleh PT PGN Pengelolaan Gas Bumi PGN di Provinsi Banten sebesar +/- 166 BBTUD untuk pelanggan Rumah Tangga, Pelanggan Kecil, Komersial, Industri serta Pembangkit Listrik yang dikelola oleh Area Cilegon dan Area Tangerang
2. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN memperkuat infrastruktur gas untuk meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan suplai gas. Dalam paparannya PT PGN mengungkapkan, sebagai Subholding Gas PGN, mengintegrasikan infrastruktur gas bumi di Indonesia dan meningkatkan akses energi bagi seluruh masyarakat dan pelanggan, melalui infrastruktur pipa maupun non-pipa (*beyond pipeline*). Hingga saat ini, PGN telah beroperasi di 17 Provinsi yang meliputi 73 Kabupaten/Kota di Indonesia dan akan terus membuka wilayah baru. Berbagai segmen pelanggan yang menikmati pasokan energi baik gas bumi, mulai dari pelanggan rumah tangga, SPBG, pelanggan skala kecil, komersial, industri, dan pembangkit listrik.

Secara verbal disampaikan bahwa salah satu kendala PT PGN dalam keberlanjutan suplai gas adalah PGN hanya mengintegrasikan infrastruktur gas bumi, akan tetapi tidak menguasai mayoritas pengelolaan sumber energi hulu gas bumi.

3. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN Mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen risiko. Sebab saat ini, berdasarkan paparan yang disampaikan, PT PGN baru menerapkan teknologi digital terbatas pada sosialisasi online & pendaftaran digital. Diungkapkan bahwa digitalisasi baru dilakukan dalam proses pendaftaran/monitoring melalui *PGN Mobile & Rely On*

4. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN untuk lebih dapat meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman positif untuk pelanggan industri. Hal ini menanggapi paparan PT PGN yang menyatakan bahwa PT PGN mempunyai Program Kegiatan pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga yang dilakukan sesuai dengan aspek konstruksi dan keselamatan yang diatur dalam Panduan/Pedoman/Peraturan Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan Rumah Tangga dan Industri.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN untuk memperluas pasar dan menjalin kerja sama dengan berbagai industri untuk meningkatkan pangsa pasar di sektor gas yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merespon paparan PT PGN yang mengungkapkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi PGN dilaksanakan oleh Sales and Operation Region (SOR) yang meliputi; 1) SOR I (Wilayah Sumatera), 2) SOR II (Wilayah Jawa Bagian Barat), 3) SOR III (Wilayah Jawa Bagian Tengah dan Timur) dan 4) SOR IV (Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua).
6. Komisi VI DPR RI meminta PGN untuk lebih meningkatkan ketersediaan gas melalui kolaborasi dengan mitra bisnis dan lembaga pemerintah terkait. Hal ini disampaikan merespon paparan PT PGN yang mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM, Ditjen Migas, BPH Migas, Pertamina, PUPR dsb) serta Pemerintah Daerah untuk Sosialisasi dan Pengawasan program jargas kepada masyarakat.
7. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN untuk dapat lebih mendorong penggunaan energi terbarukan untuk membantu mengurangi dampak lingkungan. Hal ini dinilai penting mengingat peran Gas Bumi sebagai substitusi energi yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan dibandingkan BBM. Selain itu, bahan bakar gas dinilai tetap berperan dalam transisi menuju energi baru terbarukan sebagai Base Load pada pembangkit tenaga listrik untuk menjamin keberlanjutan pasokan listrik saat pembangkit tidak terpasok oleh listrik dari EBT.
8. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN untuk dapat mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih baik untuk meminimalkan risiko operasional

dan menjamin keberlanjutan bisnis. PT PGN merespon permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa PT PGN melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap jaringan pipa serta M/RS maupun aset infrastruktur gas bumi PGN, untuk menjaga Umur Layak Operasi dan kemampuan layanan bagi pelanggan.

9. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi dan strategi manajemen yang lebih baik. Dikatakan bahwa PT PGN telah melakukan peningkatan layanan penyaluran gas bumi bagi pelanggan terkait akurasi pengukuran pemakaian gas bumi, monitoring data penyaluran secara *real-time* serta peningkatan kualitas keselamatan pengoperasian peralatan.
10. Komisi VI DPR RI meminta PT PGN menyediakan pelatihan dan pengembangan jangka panjang bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terkait issue ini PT PGN tidak mengungkapkan jumlah karyawan baik tetap maupun kontrak namun menyatakan bahwa terdapat kontribusi lainnya dari sisi penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan pendukung pengelolaan gas bumi maupun ketika periode pembangunan infrastruktur gas bumi.

Dalam pendalaman antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi atas upaya Direksi PT PGN yang diungkapkan dalam diskusi antara lain:

1. Memperkuat sistem keamanan dan keselamatan kerja yang lebih baik untuk mengurangi risiko kecelakaan.
2. Melakukan pengawasan ketat pada proses pengadaan untuk menjamin kualitas dan keandalan produk melalui program Fokus Keunggulan Produk dan Fokus Keunggulan Layanan pada pelaksanaan Jargas (Non-APBN).
3. Menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pengelolaan risiko lingkungan.
4. Menyediakan akses yang lebih mudah dan cepat untuk melakukan penyelesaian keluhan pelanggan yang mungkin timbul terutama melalui pemanfaatan media sosial.

Secara umum, Direksi PT PGN memberikan pemaparan dihadapan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI sebagai berikut:



## Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Provinsi Banten

Jakarta, 5 Juli 2023



www.pgn.co.id

### PERAN STRATEGIS PGN



Pembangunan serta pengelolaan infrastruktur, penyediaan pasokan gas serta peningkatan kualitas layanan adalah bentuk nyata PGN Dalam memenuhi kebutuhan pasokan gas bagi pelanggan



**Peningkatan layanan penyaluran gas bumi bagi pelanggan** terkait akurasi pengukuran pemakaian gas bumi, monitoring data penyaluran secara real - time serta peningkatan kualitas keselamatan pengoperasian peralatan



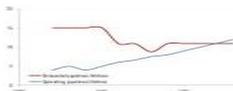
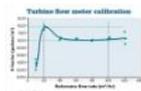
**Pemeliharaan secara berkala** terhadap jaringan pipa serta M/RS maupun aset infrastruktur gas bumi PGN, untuk menjaga Umur Layak Operasi dan kemampuan layanan bagi pelanggan

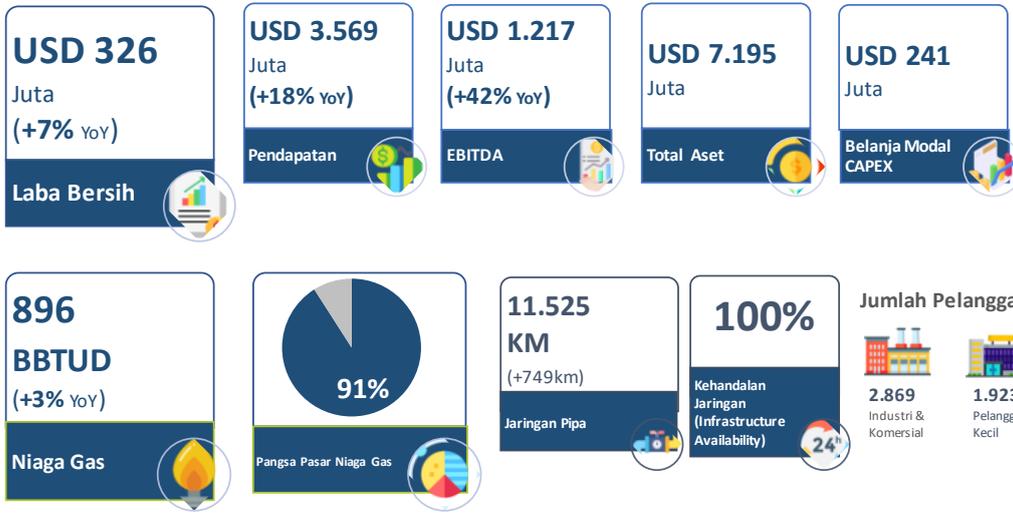


**Penambahan jaringan infrastruktur gas bumi** untuk mendukung percepatan pemanfaatan gas bumi bagi seluruh segmen pengguna gas di Indonesia sekaligus bentuk komitmen PGN bagi bangsa (*pioneering*)



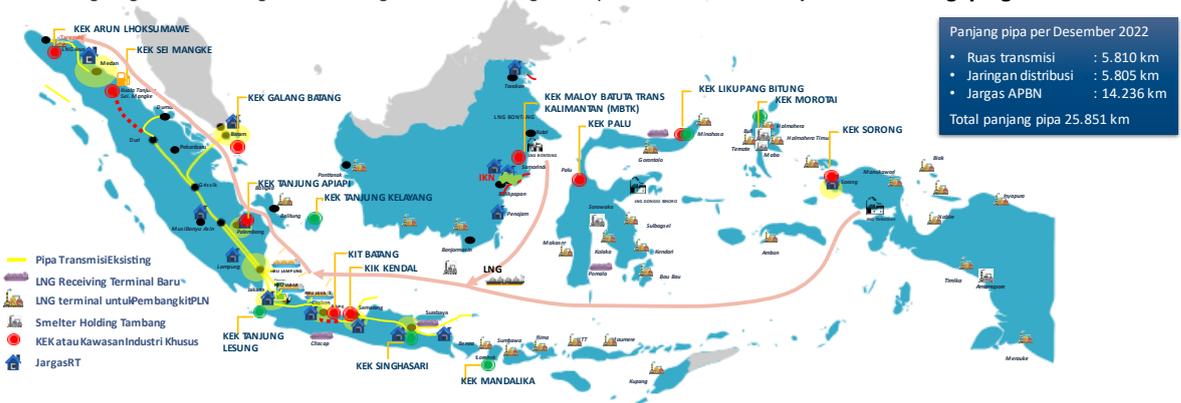
**Akuisisi pasokan gas bumi** gas pipa maupun LNG) terus dilakukan oleh PGN sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi kebutuhan pelanggan





**PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR GAS NASIONAL (2023-2030)**

Subholding Gas melakukan integrasi infrastruktur (pipa & nonpipa) untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi yang ramah lingkungan serta meningkatkan akses gas bumi di berbagai wilayah Indonesia untuk mewujudkan visi **"Energi yang Berkeadilan"**.



Panjang pipa per Desember 2022

- Ruas transmisi : 5.810 km
- Jaringan distribusi : 5.805 km
- Jargas APBN : 14.236 km

Total panjang pipa 25.851 km

**Pengembangan Infrastruktur Gas Indonesia Bagian Barat (Sumatera dan Jawa)**

- Interkoneksi pipa transmisi untuk meningkatkan konektivitas dan fleksibilitas penyaluran gas serta meningkatkan akses gas bumi ke wilayah baru
- Revitalisasi tangki Arun untuk LNG Storage dan LNG Hub
- Infrastruktur LNG Receiving Terminal untuk PRPP Tuban

**Pengembangan Infrastruktur Gas wilayah Indonesia Tengah dan Timur**

- Infrastruktur gas untuk kilang Balikpapan dan LNG Bunkering Bontang
- Pembangunan pipa transmisi & jaringan distribusi di Kalimantan Timur (IKN & Industri)
- Sinergi BUMN untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur LNG yang akan mendorong perluasan pemanfaatan gas bumi untuk sektor lainnya di berbagai wilayah kepulauan Indonesia melalui Program Gasifikasi 47 pembangkit PLN dan 10 smelter Holding Tambang/MIND ID

Terima Kasih

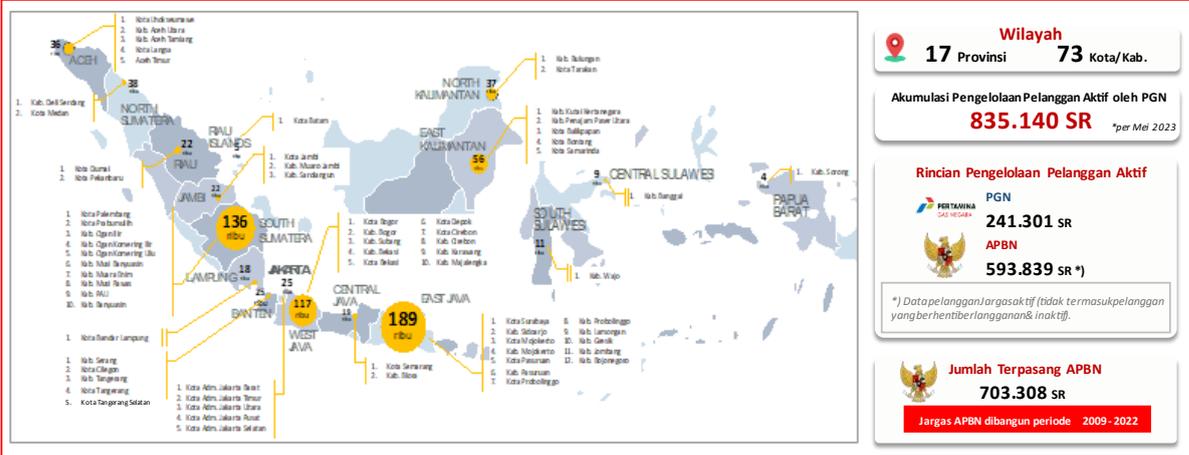


PROGRAM JARINGAN GAS RUMAH TANGGA

**PROGRAM JARGAS**  
(Periode Maret 2023)



<b>1</b>	<b>NAWA CITA PRESIDEN RI</b>	<b>2</b>	<b>PROGRAM STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>3</b>	<b>RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL</b>	<b>4</b>	<b>RPJMN TAHUN 2020-2024</b>
 "Mewujudkan kedaulatan energi." Presiden Republik Indonesia		"Pembangunan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga" Lampiran Perpres No. 58 tahun 2017		"Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan di tahun 2025." Perpres No. 22 tahun 2017		"Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan di tahun 2024." Lampiran II Perpres No. 18 tahun 2020	

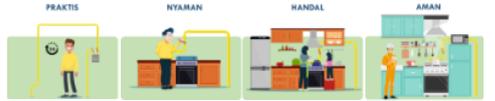


**PELAKSANAAN JARGAS PGN (NON APBN)**



**FOKUS KEUNGGULAN PRODUK**

PRAKTIS NYAMAN HANDBAL AMAN



**FOKUS KEUNGGULAN LAYANAN**

PGN Mobile  
Apikasi PGN Mobile

Pertamina Call Center 24 jam 7 hari

**PERBANDINGAN HARGA DALAM SEGMENT PASAR SASARAN**

**gaskita**

Harga Setara m3 Rp 10.000/m3 ~Rp 14.792/m3

**KONSTRUKSI JARGAS**



Kegiatan pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dilakukan sesuai dengan aspek konstruksi dan keselamatan yang diatur dalam Panduan/Pedoman/Peraturan Perusahaan.

**SOSIALISASI ONLINE & PENDAFTARAN DIGITAL**



- ✓ Digitalisasi dalam proses pendaftaran/monitoring melalui PGN Mobile & Rely On
- ✓ Pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi kepada masyarakat

**SOSIALISASI OFFLINE & PENDAFTARAN MANUAL**



Pendaftaran reguler melalui formulir/brosur/komunikasi langsung kepada masyarakat

- ✓ Kunjungan warga;
- ✓ Sosialisasi melalui forum serta kegiatan lingkungan RT/RW setempat;
- ✓ Komunikasi melalui kelurahan/kecamatan setempat;
- ✓ Iklan konvensional (banner, spanduk, iklan TV, dsb).

**SINERGI STAKEHOLDER**

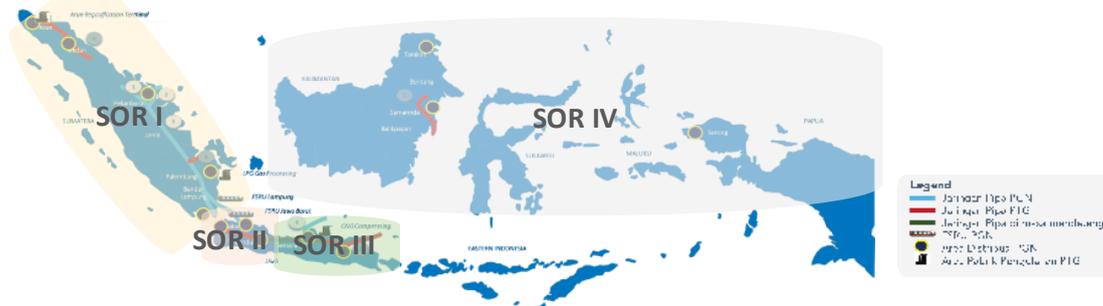


Sinergi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM, Ditjen Migas, BPH Migas, Pertamina, PUPR dsb) serta Pemerintah Daerah untuk Sosialisasi dan Pengawasan program jargas kepada masyarakat.

## PENGELOLAAN GAS PGN DI JAWA BAGIAN BARAT BANTEN

## PORTOFOLIO LAYANAN BISNIS SUBHOLDING GAS

Sebagai Subholding Gas PGN, mengintegrasikan infrastruktur gas bumi di Indonesia dan meningkatkan akses energi gas seluruh masyarakat dan pelanggan, melalui infrastruktur pipa upom non-pipa (*beyond pipeline*). Hingga saat ini, PGN telah beroperasi di **17 Provinsi yang meliputi 73 Kabupaten/Kota** di Indonesia dan terus membuka wilayah baru. Berbagai segmen pelanggan yang menikmati pasokan energi gas bumi, mulai dari pelanggan rumah tangga SPBG, pelanggan skala kecil komersial industri dan pembangkit listrik.



**Pengelolaan Subholding Gas**

- Total Jaringan Pipa Gas ~ 14.236 km
- 2 FSRU + 1 terminal regasifikasi (land based)
- 12 stasiun pengisian bahan bakar gas & 4 MRU
- 2 plant pengolahan LPG (pengupasan & kompresi)
- Pengangkutan Gas di TA 2022 1.349 MMSCFD
- Pendistribusian Gas di TA 2022 896 BBTUD
- Volume TUA (Terminal Usage Agreement) 29 BBTUD

**Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi PGN dilaksanakan oleh Sales and Operation Region (SOR) :**

1. SOR I (Wilayah Sumatera);
2. SOR II (Wilayah Jawa Bagian Barat);
3. SOR III (Wilayah Jawa Bagian Tengah dan Timur);
4. SOR IV (Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua).

## PENGELOLAAN GAS SOR II (JAWA BAGIAN BARAT)



**SOR II** merupakan unit pengelola kegiatan Sales and Operation di wilayah Jawa Bagian Barat yang mencakup Banten, DKI Jakarta dan Jawa Bagian Barat dengan volume pengelolaan s.d. **550 BBTUD**



**228.036** Pelanggan RT  
**786** Pelanggan PK



**1.441** Pelanggan Komersial Industri



**9** Pelanggan Korporat

**2,33**  
BBTUD

**324,23**  
BBTUD

**201,25**  
BBTUD

**Penugasan HGBT**

**KI - Retail**

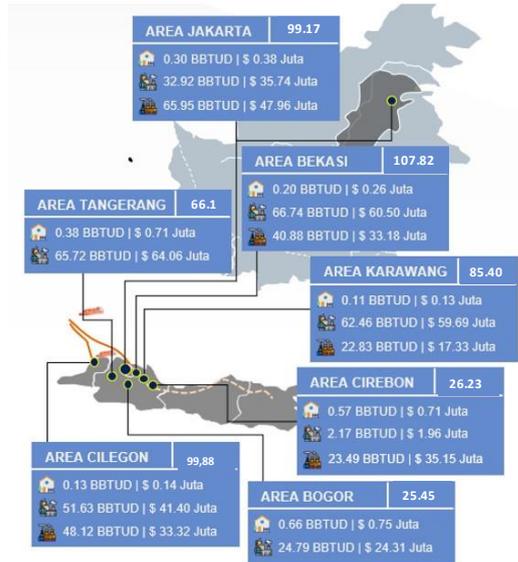
**135** Pelanggan

**166,05** BBTUD

**KI - Pembangkit Listrik**

**9** Pelanggan

**157,12** BBTUD



## PENGELOLAAN GAS BUMI DI PROVINSI BANTEN



Pengelolaan Gas Bumi PGN di Provinsi Banten sebesar +/- **166 BBTUD** untuk pelanggan Rumah Tangga, Pelanggan Kecil, Komersial, Industri serta Pembangkit Listrik yang dikelola oleh Area Cilegon dan Area Tangerang

**Area Cilegon 99,88 BBTUD**  
meliputi pengelolaan di wilayah Kota Cilegon, Kab. Serang

Area Cilegon	Jumlah Pelanggan	Vol (BBTUD)
RT & PK	<b>10.290</b>	<b>0,13</b>
Kom & Ind	<b>50</b>	<b>99,75</b>

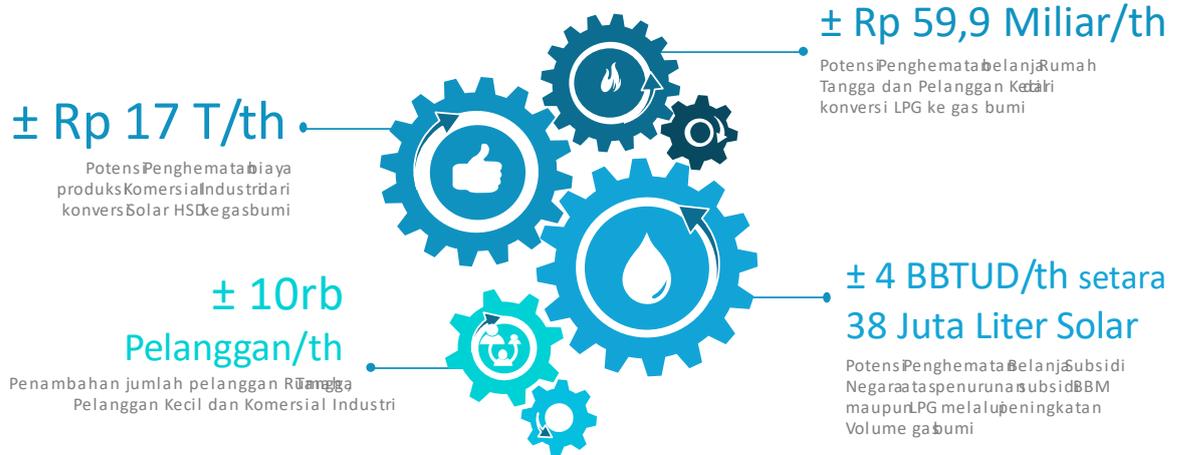
Wilayah	Jenis	Jumlah	Vol (BBTUD)
Kota Cilegon	RT & PK	482	0,01
	Kom & Ind	35	59,1
Kab. Serang	RT & PK	9.795	0,12
	Kom & Ind	15	40,65



**Area Tangerang 66,10 BBTUD**  
meliputi pengelolaan di wilayah Kota Tangerang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan

Area Tangerang	Jumlah Pelanggan	Vol (BBTUD)
RT & PK	<b>30.059</b>	<b>0,38</b>
Kom & Ind	<b>336</b>	<b>65,72</b>

Wilayah	Jenis	Jumlah Pelanggan	Vol (BBTUD)
Kota Tangerang	RT & PK	12.849	0,16
	Kom & Ind	133	20,2
Kab. Tangerang	RT & PK	17.165	0,22
	Kom & Ind	203	40,52
Kota Tangerang Selatan	RT & PK		<i>On progress</i>
	Kom & Ind		



Terdapat kontribusi lainnya dari sisi penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan pendukung pengelolaan gas bumi maupun ketika periode pembangunan infrastruktur gas bumi

KESIMPULAN DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN

1. PGN telah mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya di provinsi Banten melalui **penyediaan energi gas bumi** sebagai alat penggerak produksi pelanggan maupun dukungan dalam penurunan penggunaan BBM dan LPG subsidi.
2. PGN berkomitmen untuk melakukan perluasan layanan dan pengembangan pemanfaatan gas bumi di wilayah Banten, sehingga dibutuhkan dukungan berupa:
  - a. **Penyediaan alokasi pasokan gas yang handal dan kompetitif**
  - b. **Usulan wilayah serta Prioritisasi** wilayah pengembangan pasar di Wilayah Provinsi Banten yang disesuaikan dengan *roadmap* pengembangan utilitas maupun infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota
  - c. **Perijinan maupun kemudahan akses** dalam melakukan pengembangan infrastruktur gas bumi, termasuk dalam rangka sosialisasi pengembangan pasar ke masing-masing wilayah



Terima Kasih



**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE TANGGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN  
TTD.**

## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT PGN di Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berfoto bersama sesudah diskusi pendalaman



Diskusi pendalaman Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Jajaran Direksi PT Pegadaian



Diskusi pendalaman dipimpin Ketua Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke Provinsi Banten, M sarmuji, S.E.,M.SI dengan Jajaran Direksi PT PGN



Anggota Tim Kunspek Komisi VI DPR RI ke Provinsi Banten, Gde Sumarjaya Linggih, SE, M.A.P menyimak paparan yang disajikan Jajaran Direksi PT PGN\*\*\*\*